

MASA DEPAN KITA ADA DI LAUT
(STUDI LITERATUR TENTANG KEBIJAKAN PEMBANGUNAN SEKTOR
PERIKANAN DI NTT)

OUR FUTURE IN THE SEA
(A LITERATURE STUDY ON THE DEVELOPMENT POLICY IN FISHERY SECTOR OF THE
NTT PROVINCE)

ELKANA GORO LEBA*

Magister Manajemen dan Kebijakan Publik - Fisipol UGM - Yogyakarta

*Email: elkana.goroleba@yahoo.com

Abstraksi

Studi ini mengkaji tentang potensi pembangunan berbasis kelautan dan perikanan di NTT. Pembangunan berbasis kelautan merupakan pembangunan yang mendayagunakan sumber daya laut untuk kesejahteraan, tetapi tidak mengabaikan kelestarian ekologi kelautan. Asumsi utama dalam penelitian ini, Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mempunyai potensi kelautan yang besar, namun belum dimanfaatkan secara maksimal untuk pembangunan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui potensi kelautan di NTT untuk pembangunan dan bagaimana kebijakan pemerintah provinsi NTT dalam mengembangkan sektor kelautan, apa saja yang sudah dilakukan, bagaimana hasilnya dan apa faktor penghambat pembangunan sektor kelautan dan perikanan di NTT. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data: pengamatan lapangan dan telaah pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi sektor kelautan dan perikanan di NTT belum dimanfaatkan secara maksimal untuk pembangunan. Hal ini dapat dilihat dari produksi perikanan rendah, pembangunan infrastruktur yang tidak digunakan, tidak berorientasi pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Nelayan, alur distribusi dan pemasaran tidak efisien. Pembangunan dengan model pengelolaan sumber daya alam yang berbasis pemerintah, tetapi tidak disertai dengan kemampuan aparatur yang memadai. Oleh sebab itu, direkomendasikan perlu adanya struktur organisasi yang lebih sederhana, tetapi kaya akan fungsi. Personil organisasi yang mempunyai tingkat pendidikan formal yang masih rendah harus dibekali dengan kompetensi melalui pendidikan informal. Tingkatkan kemampuan personil organisasi dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pelatihan dan pengenalan akan pentingnya mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dalam menjalankan tugas. Membangun kerjasama lintas sektor, baik antar organisasi pemerintah di daerah, maupun organisasi swasta dan bahkan lintas provinsi secara sinergi dan berkelanjutan. Tingkatkan kemampuan personil dalam mengelola dan mengalokasikan sumber daya yang terbatas, sehingga para pelaksana kebijakan mampu mengidentifikasi dan memprioritaskan kebutuhan-kebutuhan utama dalam pembangunan.

Kata Kunci: Pembangunan, sektor kelautan, PDRB, produksi perikanan, nelayan

Abstract

This research did a study on the potentials of the marine-and-fishery-based development in the NTT province. Marine-based development is a development that uses the advantages of marine resources for the enhancement of people's prosperity without neglecting the marine ecology preservation. The main assumption of this research is that the NTT Province has a great potential of marine resources but they have not been used with utmost effort for development. The objective of this study is to explore the marine potentials of NTT waters for development and to what extent the provincial government has made its policy to develop marine sector, what has been carried out, what are the results, and what are the obstacles in the development

of marine and fishery sector in NTT. Methods used are qualitative and the data collection is done through field observation and literature study. The results show that the marine potentials have not been utilized at the maximum level for the economic development. This can be detected from the low production of fish, unused infrastructure, no fisherman-oriented development, inefficient distribution and marketing of fish. This government-based natural resources management is not accompanied by sufficient technological know-how. Therefore it is recommended to establish a simpler organization with more functions. The skill and the holistic knowledge of the personnel should be upgraded through education. We also need to enhance inter-sectoral cooperation, both between government organizations and with private enterprises within the province or between the provinces in a sustainable way. The personnel competence needs to be enhanced in the management and allocation of limited resources, so that policy implementer can identify and make the priority of prime needs for human development.

Key words: development, marine sector, gross regional domestic products, fishery products, fisherman

Pendahuluan

Sesungguhnya, masa depan kita ada di laut. Sebab, dikutip dari *Mckinsey Global Institute* dalam rilis Sekretariat Kabinet RI 2012, empat pilar utama pembangunan Indonesia yang akan membawa Negara ini menjadi negara dengan perekonomian sepuluh besar dunia pada tahun 2030, *pertama*: sektor kelautan dan perikanan, *kedua*: sektor pertanian, *ketiga*: sektor jasa dan *keempat*: sektor pendidikan. Beberapa argumentasi mengapa laut menjadi sektor yang sangat penting dalam pembangunan dilihat dari letak Indonesia yang terbentang di antara benua Australia dan Asia, sekaligus negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki lebih dari 17.000 pulau. Gugusan pulau yang dibatasi oleh laut, tentu Indonesia mempunyai pantai yang panjang, dikutip KKP RI tahun 2015, panjang garis pantai yaitu 104.000 km. Dengan rincian laut teritorial 2.981.211 km² ZEEI, wilayah laut: 284.210,9 km², dan 279.322 km² laut 12 mil (UNCLOS, 1982). Sementara itu, sekitar 6,2 juta penduduk Indonesia terlibat dalam kegiatan perikanan (FAO, 2006). Sedangkan sumbangsih sektor perikanan bagi PDB Indonesia masih kecil. Potensi lestari sumber daya ikan laut di Indonesia mencapai 12,54 juta ton per tahun. Sementara itu, laju Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB) sektor perikanan lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi nasional dan sektor pertanian, peternakan dan kehutanan (Media Indonesia, 20 Mei 2019).

Oleh sebab itu, arah pembangunan masa depan Indonesia harus mengedepankan sektor

kelautan dan perikanan. Basisnya pada potensi kelautan dengan tiga pilar dalam pembangunan modern, yaitu: *pro-poor* (pengentasan kemiskinan), *pro-job* (penyerapan tenaga kerja), dan *pro-growth* (pertumbuhan) dan *pro-invironment* (kelestarian lingkungan) (Departemen Kelautan dan Perikanan, 2003).

Namun, ironisnya, banyak nelayan masih hidup di bawah garis kemiskinan. Nelayan skala kecil di NTT masih hidup di bawah garis kemiskinan yang berlangsung secara turun temurun. Masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan kesejahteraannya lebih rendah dibanding dengan yang bukan nelayan. Ditinjau dari undang-undang perikanan No.45 tahun 2009, dikutip dari Departemen Kelautan dan Perikanan (2002), nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Sementara orang yang bekerja membuat jaring, mengangkut alat-alat penangkapan ikan ke dalam perahu atau kapal motor, tidak dikategorikan sebagai nelayan.

Penyebab kemiskinan nelayan (Kusnadi, 2002) disebabkan oleh dua faktor. *Pertama*, faktor alamiah. Faktor alamiah berhubungan dengan fluktuasi musim penangkapan ikan dan struktur alamiah sumberdaya ekonomi desa. Artinya, aktivitas penangkapan ikan terganggu karena tingginya gelombang laut pada musim-musim tertentu, terutama pada musim barat. Selain itu, nelayan tidak kuat secara ekonomi. Berdasarkan Laporan Tahunan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2017, pendapatan rata-rata nelayan pada tahun 2014 sebesar Rp. 2,15 juta

per bulan dan Rp. 2,70 juta per bulan pada tahun 2017. *Kedua*, faktor non-alamiah. Faktor ini berkaitan dengan keterbatasan teknologi dalam penangkapan ikan yang digunakan oleh nelayan. Kebanyakan nelayan kita masih menggunakan cara-cara tradisional dalam penangkapan ikan, sedangkan nelayan-nelayan asing sudah menggunakan teknologi modern. Disamping itu, terbatasnya sarana prasarana lain seperti kapal dan alat tangkap yang produktif namun bersifat ramah lingkungan menjadi salah satu kendala nelayan di NTT” (Angelinus Vincentius, ahli perikanan Universitas Nusa Nipa (Unipa) Maumere).

Dengan demikian produktivitas mereka lebih baik. Disamping itu, dari sisi tingkat pendidikan, sekitar 1,3 persen berpendidikan tinggi, sementara sekitar 70 persen hanya berpendidikan Sekolah Dasar dan bahkan tidak tamat sekolah Dasar (Kompas.com, 19 November 2014). Fakta di atas menunjukkan bahwa profesi sebagai nelayan identik dengan kemiskinan. Ketertinggalan dari segala aspek kehidupan. Itulah yang menyebabkan, banyak orang tidak mau jadi nelayan, atau menggantungkan hidupnya dari laut. Padahal potensi dan kekayaan laut kita sangat menjanjikan.

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki 1.192 pulau dengan panjang garis pantai sekitar 5.700 km dan luas laut mencapai 15.141.773, 10 hektare. Potensi perikanan tangkap NTT, terdiri atas Potensi Lestari (Maximum Sustainable Yield/MSY) 388,7 ton/tahun dengan jenis-jenis ikan ekonomis seperti ikan pelagis (tuna, cakalang, tenggiri, layang, selar, kembung), ikan demersal (kerapu, ekor kuning, kakap, bambangan) dan komoditi lainnya (lobster, cumi-cumi, kerang darah, dan lain-lain) (www.mongabay.co.id/2019/05/09/).

Dari aspek nelayan, berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT tahun 2017, nelayan NTT berjumlah 79.642 orang, sementara jumlah Rumah Tangga Perikanan sebanyak 25.003 RTP. Sedangkan Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebagai salah satu indikator tingkat kesejahteraan nelayan per Desember 2017, sebesar 108,33. Perbandingan tingkat kesejahteraan nelayan NTT masih lebih rendah dibanding dengan tingkat kesejahteraan nelayan secara nasional yang mencapai 109,85.

Perekonomian suatu daerah dinilai bertumbuh ketika angka pertumbuhan pada tahun berjalan lebih tinggi dari tahun atau periode sebelumnya. Widodo (1990) menyatakan bahwa perencanaan pembangunan ekonomi pada umumnya berorientasi pada pertumbuhan (*growth*). Pertumbuhan tersebut merupakan proses dari adanya peningkatan Produk Domestik Bruto (PDRB) atau pendapatan nasional riil. Sementara itu, Wijaya (1992), mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi akibat adanya kenaikan output perkapita. Dalam mendorong peningkatan PDRB untuk pertumbuhan ekonomi ini, Syafrizal (1997) mengatakan bahwa suatu daerah atau negara harus mempunyai prioritas pembangunan. Prioritas yang dimaksud merujuk pada potensi yang dimiliki daerah yang bersangkutan. Bila pembangunan tidak prioritas pada potensi daerah maka akan mengakibatkan pertumbuhan PDRB daerah yang bersangkutan melambat dan tentu akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi juga lemah.

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui potensi kelautan dan perikanan di NTT, melacak kebijakan pemerintah provinsi NTT tentang pengembangan sektor kelautan dan perikanan, serta bagaimana model kebijakan yang tepat bagi pembangunan berbasis kelautan dan perikanan di NTT.

Kajian Teori Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Perikanan

1. Teori Ekonomi Basis (*economy base theory*)

Pengertian ekonomi regional terdapat sector basis (sektor unggulan) dan non basis (sektor non unggulan). Suatu sektor diketahui basis atau unggul melalui perbandingan berskala internasional, nasional atau regional. Keunggulan berskala internasional apabila sektor yang bersangkutan mampu bersaing dengan sektor yang sama dengan negara lain. Sedangkan keunggulan secara nasional, apabila sektor di wilayah tertentu mampu bersaing dengan sektor yang sama yang dihasilkan oleh wilayah lain di pasar nasional atau domestik (Wijaya, 1992). Pokok pikiran dari ekonomi basis menurut Richardson (1977), berhubungan langsung dengan permintaan barang dan jasa dari luar

daerah. Glasson (1990) mengatakan bahwa sektor basis (*basic activities*) merupakan kegiatan sektor ekonomi yang dapat mengekspor produk barang dan jasa ke luar batas-batas perekonomian daerah yang bersangkutan atau dengan kata lain, sektor ini tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik tetapi juga pasar luar daerah. Sementara itu, sektor non basis (sektor non unggulan) adalah Sektor yang hanya mampu melayani kebutuhan domestik suatu daerah saja tetapi juga dapat menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat lokal.

1. Komponen Pertumbuhan Ekonomi

Todaro (2000), mengemukakan bahwa ada beberapa komponen yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Yaitu, pertama, akumulasi modal. Hal ini terjadi, apabila sebagian dari pendapatan ditabung (diinvestasikan) kembali, dengan tujuan untuk memperbesar output atau pendapatan dikemudian hari. Kedua pertumbuhan penduduk yakni Jumlah penduduk yang banyak akan berdampak positif pada ukuran pasar domestik yang besar. Dimana pertumbuhan angkatan kerja secara tradisional, dianggap sebagai salah satu faktor positif yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi. tetapi pertumbuhan penduduk juga tergantung pada kemampuan sistem perekonomian yang bersangkutan untuk menyerap tenaga-tenaga produktif di daerah yang bersangkutan. Ketiga, kemajuan teknologi. Melalui kemajuan teknologi, akan ditemukan cara baru atau perbaikan cara-cara lama dalam menangani pekerjaan tradisional. Dengan demikian maka, akan mendukung investasi dan tenaga kerja guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

• Pembangunan Sektor Perikanan

Pembangunan kelautan dan perikanan merupakan pembangunan yang meliputi upaya untuk menggali, memanfaatkan dan meningkatkan potensi-potensi kelautan dan perikanan melalui industri kelautan perikanan, pariwisata bahari, energi dan sumberdaya mineral, jasa kelautan sebagai komoditas pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat (KKP RI, 2012; dan Dahuri, 2009). Dalam

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang “Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025”, mengamanatkan pembangunan dengan semangat yang *pro-poor, pro-growth, pro-job* dan *pro-environment*. Salah satu dari itu adalah menjadikan sektor kelautan sebagai komoditas ekonomi, sehingga mewujudkan Indonesia sebagai negara kepulauan yang maju mandiri dan kuat secara ekonomi. Kebijakan pembangunan kelautan memiliki lima pilar utama yang terdiri dari Budaya Bahari (*Ocean Culture*), Tata Kelola di Laut (*Ocean Governance*), Pertahanan, Keamanan Dan Keselamatan di Laut (*Maritime Security*), Ekonomi Kelautan (*Ocean Economy*) dan Lingkungan Laut (*Marine Environment*). Pilar-pilar ekonomi dan lingkungan inilah yang menjadi semangat pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan terutama kemiskinan nelayan dan masyarakat pesisir (*Dewan Kelautan RI*). Di samping itu, *Septifitri, et. al. (2009)* dan *Andrus Meiner (2010)* melihat pembangunan kelautan sebagai kebijakan yang menekankan pada sumber daya kelautan, pembangunan manusia nelayan dan masyarakat pesisir tanpa mengesampingkan kelestarian ekosistem laut sebagai komoditas pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Teori Pembangunan Sektor Perikanan

Teori pembangunan sektor perikanan dalam penelitian ini, terbagi dalam tiga, yaitu, model pembangunan berbasis pada pemerintah, model pembangunan berpusat pada rakyat dan model campuran (Co-Management).

1) Model Pembangunan Berbasis Pada Pemerintah

Model pembangunan berbasis pemerintah lebih mengedepankan peran pemerintah dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan serta wilayah pesisir, terutama dalam menjamin pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan. Higgins dalam Syahrul, (2008) mengemukakan bahwa aspek yang sangat penting untuk mendukung keberhasilan model pembangunan ini adalah kecakapan organisasi pelaksana kebijakan dalam mengelola sumberdaya alam. Kemampuan itu meliputi lingkungan internal yang meliputi kekuatan (*strength*) dan kelemahan

(*weakness*). Faktor kekuatan tersebut berhubungan dengan kemampuan internal pemerintah sebagai pelaksana kebijakan sehingga organisasi dapat mengelola sumberdaya dengan baik. Sedangkan faktor kelemahan (*weakness*) yaitu keadaan ketidakmampuan organisasi yang berdampak pada kegagalan terhadap pencapaian tujuan pengelolaan sumberdaya. Faktor yang menjadi halangan bagi organisasi pemerintah dalam mengelola sumber adalah: struktur yang miskin fungsi, anggaran yang minim dan sumber daya manusia yang rendah (Joeyono, 1974).

2) Model Pembangunan Berpusat Pada Rakyat

People Centered Development Model atau Pembangunan Berpusat Pada Rakyat merupakan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, juga disebut teori pembangunan berpusat pada rakyat (*people centered development*) sehingga proses pembangunan harus berorientasi pada peningkatan kualitas hidup manusia (Ife, 2008). Argumentasi lain dikemukakan oleh Nikijulwu (2002) mengatakan bahwa model pembangunan ini didefinisikan sebagai suatu proses pemberian wewenang kepada masyarakat dan berorientasi pada partisipasi masyarakat guna mengelola sumber daya kelautan. Model ini juga diaplikasi dengan cara mendefinisikan kebutuhan, tujuan dan aspirasi masyarakat sebagai objek pembangunan.

Lebih lanjut Mardikanto dan Soebiato (2012) mengatakan bahwa teori ini disebut sebagai *Alternative Development Theory*. Komponen penting keberhasilan pengelolaan berbasis masyarakat menurut Dahuri (2003) antara lain adalah:

1. Kesepakatan dan komitmen yang kuat antara tiga pelaku utama, yaitu pemerintah sebagai pembuat kebijakan (*policy maker*), masyarakat pesisir dan nelayan sebagai objek pembangunan, dan peneliti atau ilmuwan baik bidang sosial, ekonomi, maupun sumber daya sebagai penyedia informasi ilmiah.
2. Pemahaman yang jelas terhadap kebijakan dari pelaku utama. Pemahaman itu meliputi bagaimana mereka memahami peran dan tanggung jawab masing-masing elemen dalam melaksanakan kebijakan. Dengan demikian, kebijakan akan terlaksana dengan baik.

3) Model Campuran (Co-Management)

Zerner, C. (1994) dalam Imam Bachtiar (2004), menyatakan bahwa model campuran (Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Partisipatif) adalah pendekatan yang menggabungkan antara pengelolaan sumber daya yang sentralistik yang dilakukan oleh pemerintah (*government based management*) dengan pengelolaan sumber daya yang berbasis masyarakat (*community based management*). Dengan demikian, model ini mengedepankan pengelolaan sumber daya perikanan, dimana lebih dari satu pihak (*stakeholder*) bernegosiasi, mendefinisikan dan menjamin pembagian peran dalam pengelolaan dan tanggung jawab terhadap sumber daya. Sehingga pemerintah akan berperan sebagai pembuat kebijakan (*policy maker*) dan pelaku pemanfaatan sumber daya (*user groups*) berbagi tanggung jawab (*sharing the responsibility*) dalam pengelolaan dan pemanfaatann sumber daya laut dengan tujuan mewujudkan keseimbangan tujuan sosial dan ekonomi dalam kerangka kelestarian ekosistem dan sumber daya perikanan.

Aspek Pengelolaan Sektor Perikanan

1) Pembangunan Sumber Daya Manusia Nelayan

Pembangunan SDM di wilayah pesisir bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas masyarakat pesisir guna meletakkan dasar pengembangan ekonomi yang produktif dan kompetitif serta berkelanjutan. Wilayah pesisir Indonesia dihuni oleh kurang lebih 2,17 juta penduduk. Dilihat dari tingkat pendidikan, sekitar 70 persen nelayan berpendidikan Sekolah Dasar (SD) ke bawah dan hanya sekitar 1,3 persen yang berpendidikan tinggi. (*Kompas.com, 19/11/2014*). Kualitas sumber daya manusia akan berdampak besar terhadap pengelolaan sumber daya alam perikanan. Menurut Basroni Syahrul (2008) pembangunan SDM menjadi penunjang ekonomi untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir. Pembangunan SDM masyarakat pesisir menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai penggerak. Hal itu disampaikan Bambang Kusbandrijo (2011), bahwa salah satu tugas pemerintah sebagai lembaga publik adalah pengembangan sumber daya manusia dan

pembangunan masyarakat desa pesisir. Realisasi itu, pemerintah dapat bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), institusi bisnis, lembaga-lembaga modal, perguruan tinggi, terlebih masyarakat yang menjadi objek pembangunan.

2) *Pembangunan Sarana dan Prasarana*

Pembangunan sarana dan prasarana sangat penting dalam industri perikanan. Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT), perkapalan, pabrik es, alat tangkap, Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP), Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), termasuk tempat pengolahan produk, hingga bidang pemasaran serta distribusi merupakan bagian dari pembangunan sarana perikanan. Sementara itu, Torbjørn Trondsen, (2001) ketersediaan dan akses informasi terhadap produk perikanan dan pemasaran hasil juga sangat penting. Mutu dan jumlah sarana yang belum memadai adalah salah satu faktor penghambat pembangunan bidang perikanan dan kelautan selama ini. Karena jaminan sarana tidak hanya memberikan kenyamanan bagi nelayan, namun juga untuk menjamin penanganan hasil produksi, mutu dan harga ikan. Menurut Daniel R. Monintja, et.al., (2009) Pembangunan sarana perikanan yang dalam hal ini berkaitan dengan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) dilakukan berdasarkan kebutuhan sarana perikanan untuk pengembangan perikanan tangkap berbasis komoditas unggulan.

3) *Pembangunan sektor Produksi dan Pemasaran*

Hasil Perikanan

Pemasaran adalah proses manajerial yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok dalam memperoleh kebutuhan dan keinginan mereka, dengan cara membuat dan mempertukarkan produk dan nilai dengan pihak lain (Kotler dan Armstrong, 2000). Sebab itu, selain pembangunan Sarana dan Prasarana perikanan dan sumber daya manusia masyarakat nelayan, aspek lain yang tidak kalah penting dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan adalah meningkatkan hasil-hasil produksi nelayan serta bagaimana hasil tangkapan nelayan dipasarkan. Akses nelayan terhadap sumber-sumber permodalan seperti bank, koperasi dan juga stimulus dari pemerintah menjadi hal yang sangat penting demi meningkatkan hasil-hasil

produksi. Dengan demikian, makan dampaknya pada peningkatan hasil tangkapan nelayan dan nilai tambah dari hasil tangkapan sehingga mempunyai daya saing baik di tingkat regional maupun global. Richard Thain, (2012) mengemukakan bahwa bila akses modal dan sarana alat tangkap serta SDM sudah baik, maka hal yang sangat penting lagi adalah sikap kewirausahaan masyarakat sasaran. Setelah produksi meningkat, langkah selanjutnya adalah bagaimana hasil itu dipasarkan. Sejauh ini, aspek pemasaran hasil laut masih banyak kendala skarena rendahnya nilai tambah. Akibatnya, kita kurang berdaya saing. Karena produk perikanan nelayan tradisional belum mengedepankan pada pemberian nilai tambah. Sebab menurut Kotler (2000) kegiatan pemasaran meliputi fase memilih nilai, menyediakan dan mengkomunikasikan nilai.

Dimensi Pengelolaan Sektor Perikanan

1) *Kemampuan Organisasi Pelaksana Kebijakan*

Milen dalam Syahrul, (2008) mengemukakan bahwa kemampuan adalah proses dimana individu, kelompok, organisasi, institusi dan masyarakat tertentu untuk meningkatkan kemampuannya guna menjalankan fungsi pokok, memecahkan masalah, menentukan dan mencapai tujuan, memahami dan menghubungkan kebutuhan pengembangan dalam konteks yang lebih luas secara terus menerus. Di sisi lain, kemampuan atau kapasitas menurut McNair (1994) adalah segala sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sarana prasarana yang dimiliki oleh suatu organisasi (pelaksana kebijakan) yang siap pakai dan tepat guna demi menggambarkan potensi keuntungan yang akan diperoleh perusahaan. Dengan demikian, dalam hubungannya dengan pengelolaan sektor kelautan dan perikanan, maka perlu adanya proses peningkatan kapasitas melalui pendidikan aparatur, dalam hal ini aparatur pemerintah, agar mampu menjalankan kebijakan pembangunan perikanan dengan baik.

2) *Kolaborasi Lintas Sektor*

Kolaborasi atau kerjasama merupakan hubungan atau dapat juga berupa perjanjian yang saling menguntungkan antara dua pihak atau lebih. Kerjasama lintas sektor adalah hubungan kerjasama antara dua institusi atau lebih untuk

memecahkan masalah secara bersama-sama dengan prinsip kesetaraan, keadilan, keseimbangan dan keterbukaan dan saling menguntungkan (Ramduny, 1998; Brown, 2000; Gundergan & Gudergan, 2002). Dalam hal pengelolaan bidang perikanan, kerjasama antar sektor seperti ini dilakukan agar berkolaborasi demi membangun sarana dan prasarana perikanan sebagai upaya untuk meningkatkan hasil tangkapan nelayan sekaligus membuka akses pasar dan permodalan dengan tidak mengesampingkan sumber daya manusia nelayan sebagai obyek pembangunan (Mattersich dalam Ginsler, 1998). Kolaborasi ini perlu diterapkan dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan seperti kerjasama lintas institusi pemerintah, baik antar kabupaten/kota, maupun dinas dan bahkan lembaga pemerintah antar propinsi dan negara, atau organisasi non pemerintahan atau NGO.

Beberapa contoh kerjasama yang pernah diterapkan di beberapa daerah antara lain, seperti lembaga swasta dengan organisasi nelayan, seperti Gappindo (Gabungan Pengusaha Perikanan Indonesia), Koperasi Unit Desa "Mina" (KUD-MINA)DEKIN (Dewan Kelautan Indonesia), POKMASWAS (Kelompok Masyarakat Pengawas), HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia). Lembaga-lembaga tersebut di atas sangat berperan penting dalam hal pendampingan terhadap nelayan, memperjuangkan hak-hak nelayan, membuka akses permodalan dan lapangan kerja.

Selain itu, kerjasama juga dapat dilakukan untuk meningkatkan sumber daya manusia nelayan dan masyarakat pesisir. Hal ini paling mungkin dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai pengambil kebijakan bersama institusi pendidikan guna pengembangan sumber daya manusia (SDM) nelayan. Lembaga pendidikan dimaksud antara lain SUPM (Sekolah Usaha Perikanan Menengah), PT (perguruan tinggi), lembaga modal seperti perbankan dan koperasi agar membuka akses pinjaman modal bagi para nelayan dan pelaku usaha perikanan. Disamping itu, kerjasama antar daerah juga penting. Beberapa daerah yang menerapkan kerjasama ini seperti, propinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat yang mana telah berhasil dalam pembangunan kelautan dan

perikanan. Data BPS (2013), propinsi-propinsi tersebut mampu meningkatkan hasil produksi dan nilai jual ikan di atas 500 miliar.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan telaah pustaka, pengamatan langsung di lapangan. Kemudian dilakukan analisa dan perbandingan hasil temuan peneliti terdahulu dari berbagai jurnal ilmiah baik di dalam maupun luar negeri. Selain itu, media lain seperti gambar, foto, produk hukum, kebijakan, program-program pemerintah dan berbagai literatur yang relevan menjadi sumber data yang kemudian dianalisis dengan metode kualitatif, dimulai dengan menyiapkan dan mengorganisasikan data yang diperoleh dari telaah dokumen dan literatur lainnya guna analisis (bdk. Creswell 2014).

Hasil dan Pembahasan

Pembangunan Fasilitas Produksi Perikanan

Membaca laporan tahunan kementerian kelautan dan perikanan tahun 2017. Setidaknya ada dua Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) yang dibangun oleh kementerian kelautan dan perikanan. Di Sumba Timur dan Rote Ndao.

Pembangunan SKPT Sumba Timur pada tahun 2017 dengan kegiatan-kegiatan diantaranya:

Tabel 1.1
Pembangunan Fasilitas Produksi Perikanan Tangkap di NTT

SKPT Sumba Timur	SKPT Rote Ndao
1) Sarana Budidaya	1) Pembangunan SKPT Rote Ndao pada tahun 2017 mencakup kegiatan-kegiatan diantaranya:
2) Kebun Bibit RL (75 paket)	
3) Sarana Budidaya RL (100 paket)	2) Kebun Bibit RL (70 unit)
4) Sarana budidaya air tawar (2 paket)	3) Sarana Pembesaran Budidaya RL (200 unit)
5) Perahu fiber (50 unit)	
6) Para-para (100 unit)	4) Pengadaan para-para (200 unit)
7) Rumah ikat (10 unit)	5) Kendaraan truck berpendingin roda 6 (2 unit)
8) BBI Lewa (jaringan listrik, hatchery indoor, semenisasi kolam, pengadaan induk dan pakan)	6) Excavator (2 unit)
9) Sarana Penangkapan	7) Buldozer dan drum fibrating roller (@ 1 unit)
10) Kapal <5 GT (30 unit)	
11) Coolbox (9 unit)	8) Reviu Master Plan
12) Sarana Penanganan dan Pengolahan	
13) Gudang RL (1 paket)	
14) Lantai jemur (1 paket)	
15) Kendaraan pick up (4 unit).	

Sumber: laporan tahunan kementerian kelautan dan perikanan tahun 2017

Produksi Perikanan tangkap

Potensi perikanan tangkap di wilayah perairan NTT sangat menjanjikan, yaitu 388,7 ton/tahun dengan jenis ikan ekonomis seperti ikan pelagis, ikan demersal dan komoditi lainnya. Hingga tahun 2016, produksi baru mencapai 128.931 ton per tahun dari jumlah potensi produksi mencapai 393.360 ton/tahun.

Tabel 1.2
Potensi dan Realisasi Produksi Perikanan Tangkap di NTT

Potensi Produksi (Ton/Tahun)	Tahun	Realisasi Produksi (ton)
393.360	2010	92.261
	2011	102.136
	2012	66.004
	2013	103.824
	2014	108.009
	2015	118.391
	2016	128.931

Sumber: BPS RI dan DKP Provinsi NTT (diolah)

Sementara itu, terbaca dari laporan kementerian kelautan dan perikanan tahun 2017 tentang ranking dan proporsi sektor perikanan terhadap PDB nasional dan PDRB provinsi dalam rentan waktu tahun 2010-2015, NTT masih menempati urutan ke-15 di bawah Sulawesi, Papua dan Papua Barat. Sementara ketiga besar dihuni oleh Maluku, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat. Proporsi sektor perikanan terhadap PDRB Provinsi, Nusa Tenggara Timur 0,05. Selisih 0,9 dengan Maluku pada tingkat pertama dengan proporsi 0,14. Bila dilihat lebih lanjut, hal ini menjadi menarik karena NTT dan Maluku sama-sama proporsi kepulauan. Sementara itu, dilihat dari proporsi terhadap PDB nasional, NTT hanya menyumbang 0,02. Berikut Ranking Provinsi dan Proporsi Sektor Perikanan Terhadap PDRB.

Tabel 1.3
Ranking Provinsi dan Proporsi Sektor Perikanan Terhadap PDRB

Ranking	Provinsi	Proporsi Sektor Perikanan Terhadap PDRB Provinsi (2010-2015)	Proporsi Sektor Perikanan Terhadap PDB Nasional (2010-2015)
2	Sulawesi Tenggara	0,10	0,02
3	Sulawesi Barat	0,09	0,02
4	Gorontalo	0,08	0,02
5	Maluku Utara	0,08	0,02
6	Bengkulu	0,07	0,02
7	Selawesi Utara	0,07	0,02
8	Lampung	0,07	0,02

9	Selawesi Selatan	0,07	0,02
10	Kalimatan Utara	0,06	0,02
11	Kepulauan Bangka Belitung	0,06	0,02
12	Selawesi Tengah	0,06	0,02
13	Papua Barat	0,05	0,02
14	Papua	0,05	0,02
15	Nusa Tenggara Timur	0,05	0,02
16	Bali	0,04	0,02

Sumber: laporan tahunan kementerian kelautan dan perikanan tahun 2017

Pengembangan SDM Nelayan

Masalah sumber daya manusia akan berpengaruh terhadap produksi perikanan secara menyeluruh. Sebab, SDM itu akan berhubungan dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam menangkap ikan. Selain itu, SDM juga berkaitan dengan pengembangan usaha dan keuangan para nelayan. Selama ini, pengembangan SDM nelayan di NTT telah dilakukan dengan cara memberikan pelatihan kepada Nelayan. Dalam hal ini pelatihan penangkapan ikan yang baik dan ramah lingkungan, bantuan modal usaha dan pendampingan kepada keluarga nelayan.

Tabel 1.3

Jumlah Nelayan di NTT Berdasarkan Kategori

Tahun	Kategori Nelayan					Jumlah
	Nelayan Penuh*	Nelayan Sambilan Utama**	%	Nelayan Sambilan Tambahan***	%	
2012	20.227	12.866	26,66	11.167	28,14	44.260
2013	21.943	14.885	30,84	11.099	27,96	47.927
2014	37.067	20.512	42,50	17.424	43,90	75.003
Total	79.237	48.263	100	39.690	100	167.190

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT 2012-2014

* Nelayan penuh adalah orang yang sepenuhnya menggantungkan hidupnya dengan profesi kerja sebagai nelayan dan tidak memiliki pekerjaan atau keahlian lain.

** Nelayan sambilan utama yaitu orang yang pekerjaan utama sebagai nelayan dan memiliki pekerjaan lainnya untuk tambahan penghasilan.

*** Nelayan sambilan tambahan merupakan orang

yang memiliki pekerjaan lain sebagai sumber penghasilan, sedangkan pekerjaan sebagai nelayan hanya untuk tambahan penghasilan.

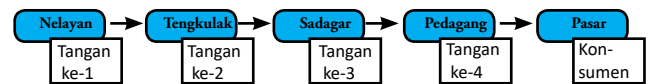
Pemasaran Hasil Produksi Perikanan tangkap

a. Pemasaran lokal

Sebagian besar hasil tangkapan nelayan di NTT, dijual di pasar-pasar lokal secara tradisional. Berikut alur distribusi ikan dari nelayan sampai ke pasar.

Gambar 1.2

Alur Distribusi Ikan dari Nelayan ke Pasar



Sumber: Data Olahan

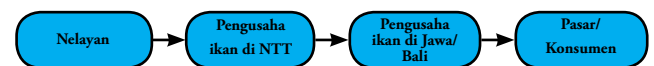
Berdasarkan alur distribusi di atas, terlihat bahwa alur pemasaran ikan di NTT cukup panjang. Agar sampai di pasar, hasil tangkapan nelayan harus dilewati tengkulak, saudagar dan pedagang baru sampai di tangan konsumen. Dengan demikian maka pihak yang dirugikan adalah nelayan dan konsumen. Sebab, nelayan menjual hasil tangkapan kepada tengkulak dengan harga yang kurang menguntungkan, sementara ikan di pasar cukup mahal, tidak sebanding dengan keuntungan nelayan.

b. Pemasaran ke Luar NTT (Pasar Domestik)

Selain pasar lokal, produk perikanan dari NTT juga diekspor ke luar NTT seperti Jawa dan Bali. Berikut ini alur distribusi pemasaran ikan ke luar NTT.

Gambar 1.3

Alur Distribusi Ikan dari NTT ke Pulau Jawa dan Bali



Sumber: Data Olahan

Hal ini dapat merugikan nelayan dan juga pengusaha perikanan di NTT. Nelayan menjual kepada pengusaha dengan harga murah, dijual ke pengusaha di Pulau Jawa dan Bali, pengusaha di Jawa dan Bali mengekspor keluar negeri, maka harga pun adalah harga ekspor (dollar). PDRB pun di terima oleh propinsi di pulau Jawa dan Bali.

c. Pemasaran Ke Luar Negeri

Berdasarkan data BPS, Pada tahun 2018, ekspor ikan dari NTT mengalami peningkatan

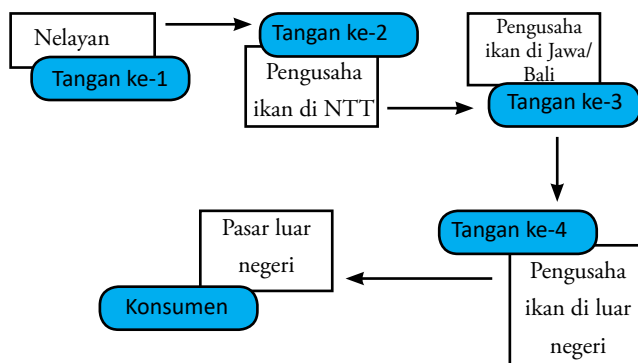
cukup tinggi. Volume ekspor 1,295,20 ton dengan nilai ekspor 4,888, 496,42 USD. Meningkat cukup signifikan dari tahun sebelumnya yang hanya ekspor dengan volume 302,49 ton dengan nilai ekspor 120,535 USD.

Tabel 1.2
Volume Ekspor Ikan dari NTT ke Luar Negeri

Tahun	Volume Ekspor (Ton)	Nilai Ekspor (USD)	Negara Tujuan
2014	442,45	416,205	Amerika, Jepang, Thailand, Singapura, Timor Leste
2015	418,99	224,634	
2016	281,05	130,774	
2017	302,49	120,535	
2018	1,295,20	4,888, 496,42	

Sumber: BPS NTT (diolah)

Gambar 1.4
Alur Distribusi Ikan dari NTT ke Pulau Jawa dan Bali



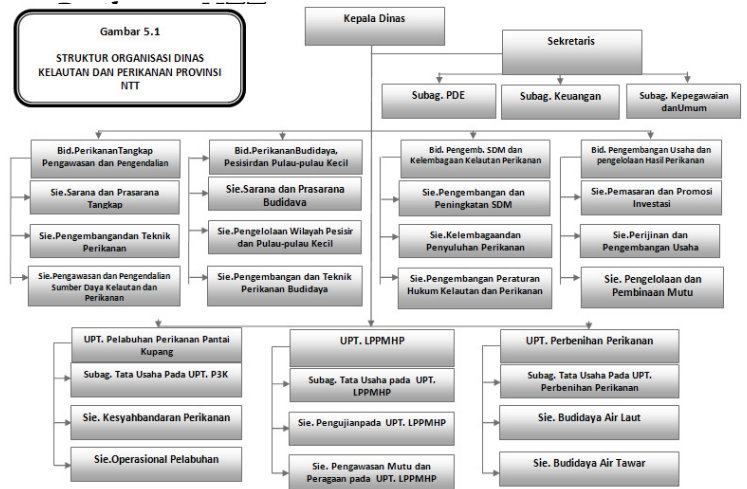
Sumber: Data Olahan

Alur distribusi itu cukup panjang dan tentu merugikan nelayan. Sebab seharusnya mereka bisa menjual ikan langsung ke pengusaha asing tanpa harus melalui pengusaha domestik. Tidak hanya itu, hampir semua produk tersebut di atas diekspor dengan barang mentah atau ikan beku dan hanya sedikit yang diekspor barang jadi. Ini menjadi tugas penting pemerintah agar memfasilitasi para nelayan guna mampu mengakses paasar luar negeri.

Faktor-Faktor Yang Menghambat Pengembangan Bidang Perikanan di NTT

1. Lemahnya Kapasitas Organisasi Pelaksana Kebijakan

1). Struktur organisasi Dinas Kelautan



Organisasi yang efisien tercermin dari struktur yang ramping tetapi kaya fungsi, bukan sebaliknya, mempunyai struktur yang gemuk, tetapi miskin fungsi. Struktur organisasi DKP NTT terlihat sangat kompleks. Struktur yang kompleks dan lebar akan menyulitkan koordinasi dan pengawasan. mbaran struktur organisasi, menunjukkan struktur yang lebar atau gemuk. Sehingga menyulitkan karyawan organisasi dalam berkoordinasi melakukan pengawasan. Untuk menciptakan struktur yang sederhana, maka ada bagian-bagian yang sebenarnya bisa digabungkan. Misalnya seksi (sie) Sarana dan Prasarana Tangkap bisa digabungkan dengan Pengembangandan Teknik Perikanan. Sie Sarana dan Prasarana Budidaya bisa disatukan dengan Sie Pengembangan dan Teknik Perikanan Budidaya. Atau Sie Pemasaran dan Promosi Investasi dapat dileburkan dengan sie Pengelolaan dan Pembinaan Mutu.

2) Personil Organisasi

Berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi NTT tahun 2014, jumlah pegawai di DKP-NTT adalah 152 pegawai, seperti disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.4

Jumlah dan Tingkat Pendidikan Aparatur Dinas KP NTT

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	%
1.	S3 (Doktor)	1	0,66
2.	S2 (Pasca Sarjana)	12	7,89
3.	S1 (Sarjana/Diploma IV)	71	46,71
4.	Sarjana muda/Diploma III	4	2,63
5.	SLTA/Sederajat	53	34,87
6.	SMP/Sederajat	3	1,97
7.	SD/SR	8	5,26
	Jumlah	152	100,00

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan NTT

Menganalisa jumlah dan spesialisasi personil organisasi di atas, bila dilihat dari segi jumlah atau kuantitas, DKP-NTT sudah mempunyai personil yang cukup untuk mengeksekusi program pembangunan. Namun, belum tentu hal itu sejalan dengan kualitas personil. Dari keahlian, memang didominasi oleh sarjana perikanan, tetapi hampir sebanding juga dengan tamatan SMA sederajat. Tingkat pendidikan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi pengetahuan dan kemampuan. Tingkat pendidikan yang rendah, berdampak pada rendahnya pengetahuan seseorang. Pengetahuan yang rendah, akan menyebabkan kapasitas yang rendah pula.

3) Kemampuan dalam Menerapkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Implementasi kebijakan akan menjadi sangat baik, apabila didukung dengan Personil yang punya kemampuan yang terupdate. Dari personil organisasi DKP NTT, masih banyak pegawai yang kelahiran antara tahun 1965-1980 belum mampu menggunakan teknologi seperti laptop dan *gadget* secara maksimal. Selain itu, pemerintah NTT belum mampu memanfaatkan hasil penelitian tentang pembangunan yang berbasis pada potensi unggulan. Salah satu survei terhadap komoditi unggulan pembangunan ekonomi di NTT dilakukan oleh Bank Indonesia dan Universitas Nusa Cendana yang mengkaji tentang Komoditi, Produk, Jenis usaha (KPJU) unggulan di NTT. Temuan dari hasil survei tersebut menunjukkan, pertanian yang saat ini menjadi andalan pembangunan, berada di ranking 7 sedangkan sektor perikanan ranking 4. Itu artinya pemerintah belum berorientasi pada

pontensi unggulan.

1. Lemahnya Kerjasama Lintas Sektor

1) Kerjasama dengan Lembaga Swasta

Peluang kerjasama dengan lembaga swasta Dewan Kelautan Indonesia (DEKIN) Provinsi NTT, Gabungan Pengusaha Perikanan Indonesia (Gappindo), Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Asosiasi Tuna Indonesia (Astuin), Koperasi Unit Desa "Mina" (KUD-MINA), Kelompok Usaha Bersama (KUB) Perikanan, Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Kelautan dan Perikanan dan LSM Bidang Kelautan dan Perikanan, dan sebagainya tidak dimanfaatkan dengan baik oleh DKP-NTT untuk mendukung pembangunan kelautan dan perikanan di NTT. Kerjasama dengan perusahaan perikanan swasta juga perlu ditingkatkan lagi. Perusahaan perikanan sekaligus sebagai pasar bagi nelayan di NTT. Seperti PT. KCBS di Mamere, PT. Indo Ikan dan Okisin di Larantuka, CV. Inaf dan CV. Geovani di Maumere dan Kupang. Demikian ditegaskan oleh Manajer Pemasaran PT. KCBS Maumere. Sebab perusahaan perikanan mempunyai peran yang penting bagi kemajuan pembangunan kelautan dan perikanan di NTT.

2) Kerjasama Antar Daerah

Perikanan merupakan rangkaian kegiatan dari yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan hingga pemasaran produk perikanan. Bertalian dengan aspek produksi dan pemasaran produk perikanan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT melakukan kerjasama pemasaran dan produksi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah, (<http://semarang.solopos.com/2014/12/20>). Perlu adanya kerjasama dengan pemerintah daerah lainnya, seperti Jawa Barat, Jawa Timur untuk memperbesar peluang pasar produk perikanan dari NTT. Ditinjau dari pengeluaran bahan-bahan TPI, data BPS Propinsi NTT menunjukkan bahwa, Propinsi NTT mempunyai pengeluaran bahan-bahan di TPI yang paling rendah. Pengeluaran bahan-bahan TPI meliputi keperluan administrasi kantor, kemasan atau pembungkus, pembelian suku cadang serta

pemeliharaan barang modal. Untuk pengeluaran bahan-bahan TPI di atas seratus juta, propinsi Jawa Tengah berpengeluaran 964,1 juta rupiah, Jawa Barat 554 juta rupiah, Sulawesi Tengah 179 juta rupiah, dan Jawa Timur 108,8 juta rupiah. Sementara propinsi yang mempunyai pengeluaran bahan-bahan TPI yang paling rendah di Indonesia yakni propinsi Banten, DIY, Aceh, Sulawesi Selatan, Sumatra Utara, Maluku Utara, Bengkulu, Kalimantan Barat pengeluaran Bahan-bahan TIP antara 10 sampai dengan 100 juta rupiah. Sedangkan NTT mempunyai pengeluaran terendah yaitu hanya 850 ribu rupiah. Oleh sebab itu, apa bila pengeluaran untuk bahan-bahan TPI ini dikaitkan dengan pemeliharaan sarana perikanan, maka tidak heran banyak sarana perikanan di NTT yang terbengkalai dan tidak terawat (BPS NTT, 2014).

3) Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan

Di NTT ada Universitas Nusa Cendana sebagai perguruan tinggi negeri yang mempunyai sumber daya yang dapat menjadi peluang bagi Pemerintah provinsi NTT guna kerjasama dalam upaya untuk meningkatkan produksi perikanan dan SDM Nelayan pelaku perikanan di NTT. Misalnya, berkerjasama untuk menggali potensi kelautan dan perikanan di NTT melalui penelitian dan penerapan teknologi serta pemberdayaan nelayan, tetapi, tidak dilakukan. Selain itu, di Kupang, terdapat Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Negeri Kupang. SUPM merupakan lembaga pendidikan vokasi yang dapat menyiapkan tenaga-tenaga handal untuk selanjutnya terjun mengelola potensi kelautan dan perikanan di NTT. Persoalannya, menurut Kepala SUMP Kupang, pemerintah daerah belum serius untuk menyerap lulusan dari SUPM Kupang. Padahal, para lulusan dari sekolah ini justru menjadi rebutan daerah lain seperti NTB bahkan negara Jepang dan Australia (*Harian Timorexpress.com/20150807*).

4) Kerjasama dengan Perbankan

Penuturan para nelayan yang sulit mengakses modal dari perbankan memperlihatkan pemerintah belum mampu memfasilitasi nelayan untuk mengakses modal. Dalam wawancara dengan beberapa nelayan, terungkap bahwa mereka lebih memilih meminjam modal operasional melaut dari

perusahaan daripada perbankan. Sekalipun hasil tangkapan mereka menjadi taruhan yang akan dibeli murah oleh pengusaha. Selain banyak persyaratan yang harus dipenuhi, ada bunga pinjaman yang dirasa membebani nelayan.

Data Bank Indonesia pada Triwulan III – 2013 tentang Peningkatan laju pertumbuhan penyaluran kredit UMKM paling tinggi pada triwulan laporan terjadi pada kategori usaha mikro dan kecil, menunjukkan bahwa presentase kredit usaha perikanan sangat kecil. Penggunaan kredit sebagian digunakan untuk kebutuhan modal kerja yaitu sebesar 80,45% dan investasi sebesar 19,55%. Sektor yang dominan dibiayai oleh perbankan adalah sektor perdagangan besar dan eceran dengan proporsi sebesar 67,87% dari total penyaluran kredit UMKM. Sementara untuk sektor pertanian sebesar 1,24% dan sektor perikanan hanya sebesar 0,50%. (Bank Indonesia, 2013).

Kesimpulan

Potensi kelautan dan perikanan di NTT sangat besar, tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal karena disebabkan oleh beberapa hal seperti berikut. Pertama, kapasitas organisasi pelaksana kebijakan yang meliputi, struktur organisasi relatif lebar sehingga menyulitkan koordinasi dan komunikasi antar bagian, tingkat pendidikan personil masih rendah, tentu hal ini berdampak kepada kemampuan mereka dalam mengeksekusi kebijakan pembangunan, kemampuan organisasi dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi masih lemah. Faktor lain lagi rendahnya kemampuan organisasi dalam mengalokasikan sumber daya. Kedua, lemahnya kerjasama lintas sektor. Kerjasama lintas sektor meliputi kerjasama dengan lembaga swasta seperti organisasi-organisasi nelayan, baik lokal maupun nasional, kerjasama antar daerah, kerjasama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan dan atau perguruan tinggi, kerjasama dengan sumber-sumber modal seperti perbankan koperasi. Oleh sebab itu, sumbangsih sektor perikanan terhadap produk domestik bruto NTT masih kecil.

Selain itu, sebagaimana tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi kelautan dan perikanan di NTT dan bagaimana kebijakan

pemerintah provinsi NTT dalam hal pengembangan sektor kelautan dan perikanan serta bagaimana model kebijakan yang tepat bagi pembangunan berbasis kelautan dan perikanan di NTT. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa pemerintah provinsi NTT menerapkan model pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan berbasis pemerintah. Masyarakat kurang dilibatkan dalam proses formulasi kebijakan dan pengambilan keputusan. Akibat dari itu, banyak bantuan pemerintah kurang menjawab kebutuhan masyarakat nelayan. Seperti armada yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan model yang dibutuhkan nelayan, kualitas kayu perahu yang tidak baik. Pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung produksi perikanan tidak dibarengi dengan pemeliharaan dan perawatan di lapangan. Pengadaan dan pembangunan infrastruktur tidak diikuti dengan pemeliharaan. Terkesan hanya untuk menghabiskan anggaran. Terbukti bantuan perahu kepada nelayan dengan kualitas kayu yang rendah, tetapi giliran nelayan masukan proposal untuk biaya perbaikan, pemerintah sulit sekali mengeluarkan dana dan bahkan tidak ada dana yang disediakan pemerintah untuk merehab perahu, SPDN yang rusak, gedung di TPI dan mesin (pembekuan ikan) yang rusak tetapi tidak direhab.

Produksi perikanan tangkap masih belum maksimal. Terlihat realisasi baru sekitar 54% atau 108.009 ton/tahun dari target produksi perikanan tangkap 200.000 ton/tahun. Atau baru 27,45% dari potensi 393.360 ton/tahun Jumlah Tangkap Yang Diperbolehkan (JTB). Sebagian besar usaha perikanan tangkap di Nusa Tenggara Timur masih merupakan nelayan tradisional, armada yang kecil, tingkat kemampuan dan pengetahuan serta keterampilan dalam mengolah produk perikanan masih lemah. Tetapi model pengelolaan sektor kelautan belum berorientasi pada pembangunan SDM nelayan. Belum ada komitmen yang kuat dalam hal pelatihan dan pendampingan secara langsung dari pemerintah kepada nelayan. Peranan perusahaan perikanan swasta masih lebih dominan dan dinelayan dari pada pemerintah dalam hal pembangunan SDM nelayan. Kurangnya campur tangan pemerintah, menyebabkan SDM nelayan rendah. Banyak nelayan bekerja hanya sebagai

buruh. Daya saing dan nilai tambah produk perikanan dari NTT masih lemah. sebagian besar atau sebanyak 63.486,2 ton hasil produksi perikanan di NTT dijual mentah dipasarkan segar di daerah NTT tanpa diberikan nilai tambah. Sebanyak 34.38,2 ton diantara hanya diolah dengan mengeringkan dan sebagian kecilnya lagi yaitu 5,956 ton diasapkan atau dipanggang. Sistem pengolahan seperti ini menunjukkan bahwa belum ada nilai tambah yang dapat meningkatkan daya saing hasil tangkapan nelayan. Manajemen pemasaran belum efisien. Terbukti ada alur pemasaran yang terlalu panjang, dari tangan pertama (nelayan) hingga pasar (konsumen). Dimana dari nelayan ke tengkulak, Suadagar, pedagang, baru masuk pasar. Sehingga merugikan para nelayan. Daya saing dan nilai tambah produk perikanan rendah. Dengan demikian, maka pemerintah belum mampu mengelola potensi laut NTT menjadi sumber pembangunan untuk kesejahteraan rakyat terutama nelayan.

Bibliografi

- Arsyad, Lincolyn. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: BPFE.
- Bachtiar, Imam. 2004. *Pengelolaan sumberdaya perikanan partisipatif di Kabupaten Lombok Timur*. NTB: FKIP Universitas Mataram.
- BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur: NTT dalam Angka Tahun 2013-2019.
- Creswell, John W. 2014. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*. (ed. 3; terj.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dahuri, Rokhmin. 2003. *Keanekaragaman Hayati Laut. Aset Pembangunan Berkelanjutan Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dahuri, Rokhmin. 1997. *Pengembangan Rencana Pengelolaan Pemanfaatan Berganda*

- Ekosistem Mangrove di Sumatera*. Dalam Panduan Pelatihan Pelestarian dan Pengembangan Ekosistem Mangrove Secara Terpadu dan Berkelanjutan. Malang: Pusat Penelitian Lingkungan Hidup, Universitas Brawijaya.
- Daniel R. Monintja. 2009. "Analisis Bionomi Ikan Karang Di Perairan Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat" (*Bionomic Analysis on Coral Fish in Raja Ampat Regency, West Papua Province*). Journal. ipb.ac.id/: Buletin PSP, Vol. XVIII, No. 3, Desember 2009.
- De Mees, Thierry. 2012. *On Gunter Pauli's Strategic Business Model of the Blue Economy*. The General Science Journal.
- Departemen Kelautan dan Perikanan. 2003. *Gerakan Nasional Pembangunan Kelautan dan Perikanan*.
- Dewan Kelautan Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. 2012. *Kebijakan Ekonomi Kelautan Dengan Model Ekonomi Biru*.
- Doma, Dok and Yakupitiyage, Amaratne. 2011. *A policy alternative for lagoon management: case study of Sre Ambel coastal marine case study of Sre Ambel coastal marine*, Journal of Coastal Conservation, Vol. 15, No. 1.
- Fauzi, A. 2005. *Kebijakan Perikanan dan Kelautan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Glasson, J. 1997. *Pengantar Perencanaan Regional* (terj. Paul Sitohang). Jakarta: LPFE.
- Griffin, Jill. 2002. *Customer Loyalty How to Earn It, How to Keep It*. Kentucky: McGraw-Hill.
- Harahap, R. Hamdani. 2000. *Pemberdayaan Wilayah Pesisir Yang Berbasis Pada Pemberdayaan Masyarakat*. Makalah disampaikan pada Rapat Kerja Center For Regional Resource Development and Community Empowerment (CRESCENT). Bogor 20-23 April 2000.
- Hasil Survei Sosial dan Ekonomi Nasional tahun 2013.
- Ife, J. Tesoriero. 2008. *Community Development*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Joeyono, S. B. 2001. *Administrasi Pembangunan: Sebuah Pengantar*. Prisma No. 44.
- Kay, R. dan Alder, J. 1999. *Coastal Management and Planning*. NewYork: E & FN SPON.
- Kotler, Philip dan Armstrong, Gary. 2000. *Prinsip-Prinsip Pemasaran (Principles of Marketing)* Jilid 1. Surabaya: Erlangga.
- Kusbandrijo, Bambang. 2012. *Growing Coast Village Economy Based on Blue Economy Paradigm: Case Study Kalanganyar Village, District Sedati, Sidoarjo, Indonesia*, The Journal of African & Asian Local Government Studies.
- Kusumastanto, Tridoyo. 2006. *Urgensi "National Ocean Development Policy" (NODEP) Bagi Kepulauan*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- M. Mathbor, Golam. 2009. *The Importance of Community Participation in Coastal Zone Management: a Bangladesh Perspective*. Community Development Journal, Vol 32 No. 2.
- Mardikanto dan Soebiato. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Martikasari, Kurnia. 2011. *Faktor-faktor yang mempengaruhi PDRB Provinsi-provinsi di Pulau Jawa*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomika dan Bisnis, UGM.
- McNair, C.J. 1994. *The Hidden Costs of Capacity*, Journal of Cost Management. Spring.
- Meiner, Andrus. 2010. *Integrated maritime policy for the European Union-consolidating coastal and marine information to support maritime spatial planning*. Journal of Coastal Conservation, Vol. 14, No. 1.
- Milen, Anneli. 2004. *Pegangan Dasar Pengembangan Kapasitas*. Yogyakarta: Pembaharuan.
- Pesisir Sebagai Alternatif Pembangunan Indonesia Masa Depan*. Nasional Program MFCDP, 22 September 2004.
- Richardson, H. W. 1977. *Dasar-dasar Ekonomi Regional*. (terj. Paul Sitohang). Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Samhour, Jameal F. et.al. 2013. *Lessons learned*

from developing integrated ecosystem assessments to inform marine ecosystem-based management in the USA. Journal of Marine Science.

- Septifitri, et. al. 2009. *Fisheries Infrastructure Needs Analysis in Order to Capture Fisheries Development Based on Commodities of South Sumatra Province* Bogor: Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Siddiqi, Akhtar Husain. 2011. *Fishery Resources and Development Policy in Pakistan.* Geo Journal, Vol. 26, No. 3.
- Smith, Martin D. and Wilen, James E. 2007. *The Marine Environment : Fencing the Last Frontier.* Review of Agricultural Economics-Volume 24, Number 1.
- Soekartawi. 2002. *Prinsip Dasar Manajemen Pemasaran Hasil-Hasil Pertanian Teori dan Aplikasinya.* Jakarta, PT Raja Grafindo Perkasa.
- Stogdill, Ralph M. 1974. *Handbook of Leadership.* New York: The Free Press.
- Sugiarti, Rara. 2013. *Pengembangan Kawasan Minapolitan Sebagai Daya Tarik Wisata Minat Khusus Di Kabupaten Pacitan.*
- Syafrizal. 1997. *Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Indonesia Bagian Barat.* Jakarta: Prisma.
- Syahrul, Basroni 2008. *Pengembangan Kapasitas Sektor Perikanan Laut. (studi kasus di Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Bengkulu).* Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM.
- Thain, Richard. 2012. *Supporting the demands of the Blue Economy.* Hydrographic Academy. Plymouth University.
- Tim Bappenas. 2004. *Pengembangan Ekonomi Daerah Berbasis Kawasan Andalan (Membangun Model Pengelolaan dan Pengembangan Keterkaitan Program).*
- Todaro, et al. 2006. *Pembangunan Ekonomi.* Jakarta: Erlangga.
- Trondsen, Torbjørn. 2001. *Fisheries Management and Market-oriented Value Adding (MOVA),* Marine Resource Economics, Vol. 16, No. 1.
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang "Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
- Widodo, H. dan Triyanto, S. 1990. *Indikator Pertumbuhan Ekonomi (Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia).* Yogyakarta: Kanisius.
- Wijaya, F. 1992. *Kopendium Ekonomika.* Ed. Pertama. Yogyakarta: BPFE.